

INSPEKTORAT KOTA JAMBI



**RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2023**

INSPEKTORAT KOTA JAMBI



Jln. Kapten A. Zaidi Saleh Kota Baru Jambi-36128

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja, Inspektorat Kota Jambi secara bertahap berupaya untuk mengembangkan kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Dengan telah disusunnya Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Inspektorat Kota Jambi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Jambi,

2022

**INSPEKTUR,**
YUNITA INDRAWATI, AP, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19740607 199403 2 002

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 4 |
| | |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU . | 6 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 12 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 13 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)..... | 15 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 18 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 19 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 19 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 20 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... | 22 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 26 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 | 7 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi | 12 |
| Tabel 2.3 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023..... | 16 |
| Tabel 3.1 | Prioritas dan Sasaran Inspektorat Kota Jambi | 20 |
| Tabel 3.2 | Tujuan Inspektorat Kota Jambi | 21 |
| Tabel 3.3 | Sasaran Inspektorat Kota Jambi | 21 |
| Tabel 3.4 | Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi | 21 |
| Tabel 4.1 | Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | 23 |
| Tabel 4.2 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 | 24 |

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan Renja

Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Kota Jambi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi, dimana Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi dalam bidang pengawasan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Kota Jambi. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Jambi mengusulkan anggaran pada APBD Kota Jambi di Tahun 2023 untuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebesar Rp.13.549.589.520,00 yang terdiri atas 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kota Jambi dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menurut prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Jambi ini dituangkan kedalam 5 (lima) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V PENUTUP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 (Tabel T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Jambi

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Jambi

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja capaian Program (Renstra) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 =(5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | |
| 6 01 | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | |
| 6 01 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | -LEVEL KAPABILITAS APIP -NILAI AREA SISTEM MANAJEMEN SDM DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS (HASIL PENILAIAN INSPEKTORAT) | -LEVEL 3 - 3,45 | B | | 96% | 100% | 9,500,865,418 | 103.01% |
| 01 01 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat) | 84.50 | 0 | - | | 100% | 648,000 | 0.68% |
| 6 01 01 2.01 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 0 | - | | 100% | 648,000 | 1.03% |
| 6 01 01 2.01 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 laporan | 0 | - | | 100% | - | 0.00% |
| 6 01 01 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6,922,489,023 | |
| 6 01 01 2.02 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 orang/bulan | 60 orang | 60 orang | 100% | 100% | 6,615,910,023 | |
| 6 01 01 2.02 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 7 orang | 7 orang | 100% | 100% | 306,579,000 | 37.40% |
| 6 01 01 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45,332,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|
| 6 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | | 6 orang | 6 orang | 100% | 100% | 45,332,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | 72.11 | | 100% | 74% | 74% | 100% | 217,134,000 | 16.38% |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - | | 70 stell | 70 stell | 100% | 100% | 84,302,000 | 38.49% |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 54 orang | | 5 kali | 2 kali | 40% | 100% | 12,290,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 54 orang | | 12 kali | 12 kali | 100% | 100% | 29,972,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - | | 52 kali | 30 Kali | 58% | 100% | 90,570,000 | 8.18% |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU | 70% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 630,196,318 | 18.61% |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | | 10 jenis | 8 jenis | 100% | 100% | 8,055,610 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | | 43 jenis | 43 jenis | 100% | 100% | 246,236,975 | 27.60% |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 paket | | 18 jenis | 18 jenis | 100% | 100% | 10,033,800 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 paket | | 21 jenis | 21 jenis | 100% | 100% | 67,831,830 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 laporan | | 820 buah | 200 buah | 100% | 100% | 26,026,200 | 109.59% |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | | 80 kali | 80 kali | 100% | 100% | 272,011,903 | 11.01% |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU | 70% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 554,957,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 unit | | 2 unit | 2 unit | 100% | 100% | 496,000,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 unit | | 6 jenis | 6 jenis | 100% | 100% | 19,690,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 unit | | 6 jenis | 4 jenis | 100% | 100% | 39,267,000 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 542,355,102 | 30.09% |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | | 600 surat | 150 surat | 100% | 100% | 11,286,800 | 14.31% |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | | 10 Mbps, 900 kubik, 39600 kwh | 10 Mbps, 900 kubik, 39600 kwh | 100% | 100% | 197,880,602 | 29.38% |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | | 10 orang | 10 orang | 100% | 100% | 333,187,700 | 31.73% |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik | 5% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 587,753,975 | 32.78% |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 unit | | 26 unit | 26 unit | 100% | 100% | 373,548,175 | 29.42% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 86 unit | | 51 unit | 20 unit | 100% | 100% | 28,102,300 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | 1 paket | 1 paket | 100% | 100% | 169,411,500 | 32.37% |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | 1 gedung | 1 gedung | 100% | 100% | 16,692,000 | |
| 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Rata-rata Nilai SAKIP PD (Komponen Evaluasi Internal) | 6.89 | | 70% | 99% | 99% | 100% | 4,336,750,000 | 4020.00% |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang | 20% | | 100% | 102% | 102% | 100% | 3,813,925,000 | 40.24% |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 12 laporan | | 16 laporan | 16 laporan | 100% | 100% | 344,850,000 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 154 laporan | | 297 laporan | 329 Laporan | 111% | 100% | 2,561,750,000 | 34.14% |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 40 laporan | | 40 laporan | 40 laporan | 100% | 100% | 36,350,000 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 40 laporan | | 40 laporan | 40 laporan | 100% | 100% | 43,625,000 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 1 Kesepakatan | | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 100% | 170,400,000 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 48 dokumen | | 28 laporan | 8 laporan | 100% | 100% | 656,950,000 | 33.30% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|-------------|--|------------|------------|------|------|-------------|--------|
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) | 100% | | 100% | 95% | 95% | 100% | 522,825,000 | 39.90% |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 12 laporan | | 21 laporan | 20 laporan | 95% | 100% | 522,825,000 | 39.90% |
| 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi | 3 | | 70% | 86% | 86% | 100% | 284,825,000 | 21.78% |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat) | 70 | | 100% | 86% | 86% | 100% | 284,825,000 | 21.78% |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 40 PD | | | | | 100% | - | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 40 PD | | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 100% | 161,825,000 | 12.37% |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 24 kegiatan | | 24 laporan | 16 laporan | 71% | 100% | 123,000,000 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 40 PD | | | 0 | | 100% | - | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Jambi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Penyajian tabel Hasil Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Jambi dapat disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2 (Tabel T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Jambi**

| No | Indikator | Target Renstra PD (Setelah Perubahan) | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan | 75% | 80% | 90% | 100% | 100% | 89,53% | 90,24% | 95% | 97% | |
| 2 | Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal) | 5,6 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,89 | 6,2 | 6,2* | 6,3 | 6,8 | *) Hasil penilaian tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB |
| 3 | Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi | 3 | 3,25 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,893 | 3 | 3 | |
| 4 | Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mulai tahun 2022 sudah tidak menjadi indikator pencapaian kinerja |
| 5 | Level Kapabilitas APIP | Level III | Level III | Level III | Level III | Level III | Level III | Level III | Level III | Level III | |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan PD telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Jambi berkenaan dengan urusan mengenai :

1. Inspektorat Kota Jambi telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada PD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Kepala PD, namun hal terkait dengan pemberian pelayanan kepada Kepala PD masih rendah karena kurangnya komitmen dari masing-masing Kepala PD dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :
 - a. Sampai dengan saat ini aparatur pengawas belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks maka diperlukan aparat pengawas yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Dengan terpenuhinya kualitas sumber daya manusia aparat pengawas fungsional yang kompeten maka akan mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan secara profesional.
 - b. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas
 - c. Kurangnya kesadaran perangkat daerah/objek pemeriksaan dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan intern maupun ekstern, terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak terlalu signifikan.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
 - a. Tantangan
Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada

pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Jambi khususnya diberi kewenangan yang luas namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri;

b. Peluang

Yang dimaksud dengan peluang dalam rencana strategis Inspektorat Kota Jambi adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi Inspektorat Kota Jambi. Dengan demikian peluang Inspektorat Kota Jambi dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.

Semangat reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance.

2) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.

Aspek teknologi komunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik dan berhasilguna. Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Walaupun saat ini Inspektorat Kota Jambi telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatan-peralatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan Inspektorat Kota Jambi.

5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti perumusan program/kegiatan prioritas untuk tahun depan adalah kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, terdapat perbedaan besaran pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dikarenakan perhitungan ulang demi tercapainya target kinerja sesuai dengan Renstra. Perbandingan pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Jambi

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Jambi

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------|---|----------------|----------------|--|------------|--|------------------------|---------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kota Jambi | INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH, NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH | B, 84,50 | 9,484,893,000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kota Jambi | -LEVEL KAPABILITAS APIP -NILAI AREA SISTEM MANAJEMEN SDM DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS (HASIL PENILAIAN INSPEKTORAT) | -LEVEL 3 - 3,45 | 11,139,849,900 | |
| 1 | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Jambi | Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat) | 84.50 | 2,497,500 | |
| 2 | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Jambi | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu | 100% | 8,937,790,947 | |
| 3 | | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kota Jambi | Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu | 100% | 14,400,000 | |
| 4 | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kota Jambi | Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | 72.11 | 289,342,500 | |
| 5 | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Jambi | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU | 70% | 647,161,981 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|------|---------------|--|------------|---|------|---------------|--|
| 6 | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Jambi | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU | 70% | 584,878,572 | |
| 7 | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Jambi | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 341,448,400 | |
| 8 | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Jambi | Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik | 5% | 322,330,000 | |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Kota Jambi | CAKUPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI SAKIP PD | 100% | 1,488,720,000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Kota Jambi | Rata-rata Nilai SAKIP PD (Komponen Evaluasi Internal) | 6.89 | 1,290,350,100 | |
| 1 | | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kota Jambi | Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang | 20% | 1,102,490,100 | |
| 2 | | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Kota Jambi | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) | 100% | 187,860,000 | |
| III | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Kota Jambi | CAKUPAN PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI RB PD | 100% | 1,818,825,000 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Kota Jambi | Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi | 3 | 832,800,000 | |
| 1 | | | | | | Pendampingan dan Asistensi | Kota Jambi | Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat) | 70 | 832,800,000 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Kota Jambi berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Jambi hanya membuat program dan kegiatan lingkup pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi, masyarakat dapat mengajukan laporan melalui pengaduan masyarakat atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus.

BAB
III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Kota Jambi menetapkan visi **“Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan Misi Kota Jambi sebagai berikut:

1. Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Rencana Kerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Kota Jambi yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Inspektorat Kota Jambi melaksanakan misi ke-satu yaitu “Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi” dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kota Jambi ditetapkanlah prioritas dan sasaran yang ingin dicapai seperti terlihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Inspektorat Kota Jambi

| No. | Prioritas | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Indikator Sasaran Perangkat Daerah |
|-----|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan |
| | | | Indeks Profesionalitas ASN | | Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal) |
| | | | Nilai SAKIP | | Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi |
| | | | Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | | Level Kapabilitas APIP |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | |

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang ingin dilaksanakan, dengan demikian tujuan tidak boleh lepas dari upaya pencapaian keberhasilan misi. Dengan merumuskan tujuan dimaksudkan agar upaya pencapaian misi lebih terarah dan terfokus, dalam merumuskan tujuan Inspektorat Kota Jambi yaitu ***"Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel"***. Pada umumnya tujuan-tujuan telah dirumuskan cukup jelas, selaras dengan misi, menggambarkan hasil yang akan dicapai, mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi, mengakomodasi isu strategis yang dihadapi serta mencerminkan dimana organisasi berperan. Hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.2
Tujuan Inspektorat Kota Jambi

| No. | Tujuan Perangkat Daerah | Indikator Tujuan Perangkat Daerah | Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2023 |
|-----|---|--|---|
| 1 | Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Nilai Area Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi | 4,87 |

Tabel 3.3
Sasaran Inspektorat Kota Jambi

| No. | Sasaran Perangkat Daerah | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 |
|-----|---|--|--|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan | 100% |
| | | Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal) | 6,89 |
| | | Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi | 3 |
| | | Level Kapabilitas APIP | Level III |

Disajikan pula mengenai Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Jambi

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023 |
|-----|--|--|
| 1 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan | 100% |
| 2 | Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal) | 6,89 |
| 3 | Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi | 3 |
| 4 | Level Kapabilitas APIP | Level III |

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Jambi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pengawasan, dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 11 kegiatan yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, 2 kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan 1 kegiatan pendampingan dan asistensi.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebesar Rp 13.263.000.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian :

- a. Rp 11.139.849.900,- untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- b. Rp 1.290.350.100,- untuk program penyelenggaraan pengawasan.
- c. Rp 832.800.000,- untuk program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Adapun sasaran Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dan program/kegiatan/sub kegiatan utama pendukungnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
|-----|---|--|--|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan | Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |
| | | Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi |
| | | Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi |
| | | Level Kapabilitas APIP | Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 disertai indikatornya dan prakiraan maju tahun 2024 tersaji pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 (T-C 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Inspektorat Kota Jambi

| No. | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Tahun 2024 | | |
|-----|------|----|----|------|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target capaian | Kebutuhan dana | | Sumber | Target | Kebutuhan dana |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | -LEVEL KAPABILITAS APIP -NILAI AREA SISTEM MANAJEMEN SDM DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS (HASIL PENILAIAN INSPEKTORAT) | Inspektorat Kota Jambi | -LEVEL 3 - 3,45 | 11,139,849,900 | APBD Kota Jambi | | -LEVEL 3 - 3,45 | 12,011,888,791 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat) | Inspektorat Kota Jambi | 84.50 | 2,497,500 | APBD Kota Jambi | | 84.50 | 2,497,500 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Inspektorat Kota Jambi | 2 dokumen | 1,248,750 | APBD Kota Jambi | | 2 dokumen | 1,248,750 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Inspektorat Kota Jambi | 2 laporan | 1,248,750 | APBD Kota Jambi | | 2 laporan | 1,248,750 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu | Inspektorat Kota Jambi | 100% | 8,937,790,947 | APBD Kota Jambi | | 100% | 9,351,535,018 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Inspektorat Kota Jambi | 65 orang/bulan | 8,768,734,947 | APBD Kota Jambi | | 65 orang/bulan | 9,182,479,018 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Inspektorat Kota Jambi | 12 dokumen | 169,056,000 | APBD Kota Jambi | | 12 dokumen | 169,056,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD Tepat Waktu | Inspektorat Kota Jambi | 100% | 14,400,000 | APBD Kota Jambi | | 100% | 14,400,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Inspektorat Kota Jambi | 12 laporan | 14,400,000 | APBD Kota Jambi | | 12 laporan | 14,400,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | Inspektorat Kota Jambi | 72.11 | 289,342,500 | APBD Kota Jambi | | 72.11 | 380,000,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Inspektorat Kota Jambi | - | - | APBD Kota Jambi | | - | - |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Inspektorat Kota Jambi | 54 orang | 232,710,000 | APBD Kota Jambi | | 54 orang | 320,000,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Inspektorat Kota Jambi | 54 orang | 56,632,500 | APBD Kota Jambi | | 54 orang | 60,000,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Inspektorat Kota Jambi | - | - | APBD Kota Jambi | | - | - |

| No. | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Tahun 2024 | |
|-----|----------|-----------|-----------|-------------|--|---|--|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target capaian | Kebutuhan dana | Sumber | | Target | Kebutuhan dana |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU | Inspektorat Kota Jambi | 70% | 647,161,981 | APBD Kota Jambi | | 70% | 581,578,509 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Inspektorat Kota Jambi | 4 paket | 15,050,133 | APBD Kota Jambi | 4 paket | 16,323,862 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Inspektorat Kota Jambi | 4 paket | 77,610,785 | APBD Kota Jambi | 4 paket | 80,000,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Inspektorat Kota Jambi | 4 paket | 15,252,493 | APBD Kota Jambi | 4 paket | 24,427,447 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Inspektorat Kota Jambi | 4 paket | 77,997,480 | APBD Kota Jambi | 4 paket | 77,977,480 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Inspektorat Kota Jambi | 12 laporan | 101,491,740 | APBD Kota Jambi | 12 laporan | 34,900,620 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Inspektorat Kota Jambi | 12 laporan | 359,759,350 | APBD Kota Jambi | 12 laporan | 347,949,100 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU | Inspektorat Kota Jambi | 70% | 584,878,572 | APBD Kota Jambi | | 70% | 615,136,364 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Inspektorat Kota Jambi | 1 unit | 400,000,000 | APBD Kota Jambi | 1 unit | 400,000,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Inspektorat Kota Jambi | 10 unit | 15,136,364 | APBD Kota Jambi | 10 unit | 15,136,364 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Inspektorat Kota Jambi | 15 unit | 169,742,208 | APBD Kota Jambi | 15 unit | 200,000,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat Kota Jambi | 100% | 341,448,400 | APBD Kota Jambi | | 100% | 418,802,400 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Inspektorat Kota Jambi | 12 laporan | 4,900,000 | APBD Kota Jambi | 12 laporan | 4,900,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Inspektorat Kota Jambi | 12 laporan | 128,200,000 | APBD Kota Jambi | 12 laporan | 180,100,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Inspektorat Kota Jambi | 12 laporan | 208,348,400 | APBD Kota Jambi | 12 laporan | 233,802,400 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik | Inspektorat Kota Jambi | 5% | 322,330,000 | APBD Kota Jambi | | 5% | 647,939,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Inspektorat Kota Jambi | 28 unit | 283,880,000 | APBD Kota Jambi | 28 unit | 607,889,000 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Inspektorat Kota Jambi | 86 unit | 38,450,000 | APBD Kota Jambi | 86 unit | 40,050,000 |

| No. | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Tahun 2024 | |
|-----|------|----|----|------|----|---|--|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | | Lokasi | Target capaian | Kebutuhan dana | | Sumber | Target |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Inspektorat Kota Jambi | - | - | APBD Kota Jambi | - | - |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Inspektorat Kota Jambi | - | - | APBD Kota Jambi | - | - |
| 2 | 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Rata-rata Nilai SAKIP PD (Komponen Evaluasi Internal) | | 6.89 | 1,290,350,100 | | 6.89 | 1,883,662,000 |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang | Inspektorat Kota Jambi | 20% | 1,102,490,100 | APBD Kota Jambi | 20% | 1,617,862,000 |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Inspektorat Kota Jambi | 12 laporan | 323,700,000 | APBD Kota Jambi | 12 laporan | 461,000,000 |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Inspektorat Kota Jambi | 154 laporan | 323,700,000 | APBD Kota Jambi | 154 laporan | 461,000,000 |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Inspektorat Kota Jambi | 40 laporan | 40,500,000 | APBD Kota Jambi | 40 laporan | 56,550,000 |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Inspektorat Kota Jambi | 40 laporan | 40,500,000 | APBD Kota Jambi | 40 laporan | 56,550,000 |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Inspektorat Kota Jambi | 1 Kesepakatan | 106,190,100 | APBD Kota Jambi | 1 Kesepakatan | 202,962,000 |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Inspektorat Kota Jambi | 48 dokumen | 267,900,000 | APBD Kota Jambi | 48 dokumen | 379,800,000 |
| | 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) | Inspektorat Kota Jambi | 100% | 187,860,000 | APBD Kota Jambi | 100% | 265,800,000 |
| | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Inspektorat Kota Jambi | 12 laporan | 187,860,000 | APBD Kota Jambi | 12 laporan | 265,800,000 |
| 3 | 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi | | 3 | 832,800,000 | | 3 | 1,157,825,000 |
| | 6 | 01 | 03 | 202 | | Pendampingan dan Asistensi | Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi PD (Hasil SA Inspektorat) | Inspektorat Kota Jambi | 70 | 832,800,000 | APBD Kota Jambi | 70 | 1,157,825,000 |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat Kota Jambi | 40 PD | 486,500,000 | APBD Kota Jambi | 40 PD | 683,025,000 |

| No. | Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 | | | Catatan Penting | Tahun 2024 | | |
|-----|------|----|------|----|---|---|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target capaian | Kebutuhan dana | | Sumber | Target | Kebutuhan dana |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Jambi | 40 PD | 134,400,000 | APBD Kota Jambi | | 40 PD | 184,900,000 |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Inspektorat Kota Jambi | 24 kegiatan | 133,900,000 | APBD Kota Jambi | | 24 kegiatan | 189,900,000 |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Inspektorat Kota Jambi | 40 PD | 78,000,000 | APBD Kota Jambi | | 40 PD | 100,000,000 |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Laporan | Inspektorat Kota Jambi | 24 | 189,900,000 | APBD Kota Jambi | | 24 | 189,900,000 |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Laporan | Inspektorat Kota Jambi | 1 | 100,000,000 | APBD Kota Jambi | | 1 | 100,000,000 |
| | | | | | | | | | 13,263,000,000 | | | | 15,053,375,791 |

BAB **PENUTUP**

Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Jambi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi;
2. Penyusunan Renja Inspektorat Kota ini berpedoman pada Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023;
3. Penyusunan Renja Inspektorat ini juga berpedoman pada RKPD Kota Jambi Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Inspektorat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Jambi;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 untuk setiap triwulannya;

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Kota Jambi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif perangkat daerah lainnya dan *stakeholder* terkait.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2023.



YUNITA INDRAWATI, AP, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19740607 199403 2 002